

DIPLOMASI JEPANG-INDONESIA: KERJASAMA PENANGGULANGAN AIR LIMBAH DI JAKARTA

Lalu Radi Myarta ¹⁾, M. Elfan Kaukab ²⁾

^{1,2)} Hubungan Internasional Program Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹⁾ Email: laluradi93@gmail.com

²⁾ Email: elvankaukab@yahoo.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel : Diterima : 19 November 2020 Disetujui : 21 Desember 2020	Di Jakarta kepadatan penduduk, perkantoran, dan industri semakin meningkat, namun tidak didukung dengan perkembangan infrastruktur dalam pengolahan air limbah yang memadai. Untuk membangun pengolahan air limbah, terjadi nota kesepakatan antara Jepang dan Indonesia dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Jakarta. Nota kesepahaman tersebut berupa bantuan modal yang digelontorkan oleh Jepang melalui program bantuan luar negerinya yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA). Sehingga bantuan tersebut menjadi landasan penelitian ini yang bertujuan untuk menelisik lebih jauh mengapa Jepang mengalokasikan dana bantuan lunak kepada Indonesia dalam upaya penanggulangan air limbah di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola eksplanatif dan analisis data sekunder yang kredibel, penelitian ini menemukan bahwa suatu bantuan bukanlah semata-mata bersifat altruistik, melainkan menggandeng kepentingan, oleh karena itu penelitian ini menemukan bahwa bantuan Jepang menggandeng beberapa kepentingan, yaitu politik, ekonomi, kemanusiaan serta adanya konstruksi opini dikawasan negara penerima bantuan.
ARTICLE INFO	ABSTRACT
Riwayat Artikel : Received : November 19, 2020 Accepted : December 21, 2020	<i>In Jakarta, the population density, offices and industries are increasing, but this is not supported by the development of infrastructure inadequate wastewater management. To build a wastewater treatment plant, there was a memorandum of understanding between Japan and Indonesia in the construction of a Wastewater Treatment Plant (IPAL) in Jakarta. The memorandum of understanding is in the form of capital assistance disbursed by Japan through its foreign aid program, namely the Japan International Cooperation Agency (JICA). So that this assistance becomes the basis for this research which aims to further investigate why Japan allocates soft aid funds to Indonesia in efforts to tackle wastewater in Jakarta. This study uses a qualitative method with an explanative pattern and a credible secondary data analysis, this study finds that assistance is not merely altruistic in nature, but it embraces interests, therefore this study finds that Japanese aid embraces several interests, namely politics, economics, humanity as well as opinion construction in the recipient country region.</i>
Key words: diplomacy, Japanese-Indonesian cooperation, IPAL, foreign aid agencies, aid motives, social construction.	

1. PENDAHULUAN

Semua warga negara berhak untuk mendapatkan akses layanan sanitasi. Terutama air bersih yang menjadi isu darurat secara global. Isu ini dapat dipahami sebagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama bagi setiap negara, bukan hanya tanggung jawab kolektif tertentu dan hasilnya dinikmati oleh beberapa kalangan saja. Namun juga semua orang bahkan secara universal air bersih menjadi hak individu yang sudah melekat sejak lahir. Sanitasi sangat penting untuk menjadi fokus yang esensial, karena menyangkut kelayakan hidup setiap manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari kelayakan air bersih, pembuangan limbah baik organik maupun non-organik dan fasilitas seperti jamban sangat diperlukan. Namun permasalahan yang sering dihadapi yaitu kurangnya kesadaran dalam membuang limbah terlepas dari hasil kegiatan manusia maupun hasil dari metabolisme manusia itu sendiri (Wibowo & Widjonarko, 2014). Pasti hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Sebagaimana yang diketahui bahwa kesehatan adalah investasi yang utama bagi setiap individu.

Kehidupan masyarakat yang sehat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bersih. Lingkungan yang sehat akan berdampak kepada peluang dalam mengembangkan produktifitas manusia baik dalam pendidikan maupun dalam kegiatan meningkatkan taraf kesejahteraan. Dengan meningkatnya taraf kesehatan manusia, maka mobilitas dalam pengembangan diri untuk pendidikan akan semakin luas. Sehingga dengan meningkatnya taraf pendidikan seseorang akan berpengaruh kepada kesadaran individu tersebut terhadap kebersihan lingkungan. Pola rantai hubungan antara interaksi sosial dan lingkungan tidak akan terhenti, selama kesadaran individu, kelompok maupun dalam bernegara masih dalam tujuan yang sama, yaitu hidup dalam lingkungan yang sehat. Namun seiring dengan realitanya, masih terlihat perilaku masyarakat yang hidup dipinggiran kota yang masih belum sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan (Manullang, 2014)

Oleh karena itu, permasalahan yang besar ini tidak lepas dari keterlibatan aktor- aktor

antar negara untuk saling membantu. Sebagai fokus permasalahan dalam kajian ini adalah Indonesia, khususnya sanitasi yang ada di wilayah pinggiran kota Jakarta. Air limbah yang terdiri dari tiga bagian yaitu air limbah industri yang berasal dari pabrik, limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan terakhir adalah air limbah perkantoran (Yudo dan Said, 2001). Pencemaran dari ketiga sumber air limbah tersebut dapat diukur dari parameter pencemaran *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) yang menunjukkan zat organik melebihi batas yang seharusnya.

Didukung dengan kepadatan penduduk Jakarta yang meningkat pada tahun 2019 yang diproyeksikan sekitar 10,5 juta jiwa (Jayani, 2019). Namun kepadatan penduduk tersebut tidak didukung dengan pengelolaan air limbah yang memadai. Jakarta sebagai pusat Pemerintahan dan juga ibu kota negara di mana segala kegiatan bisnis dan industri berlangsung secara masif, seharusnya sangat diperlukan untuk mengupgrade teknologi dan menambah sistem pengelolaan air limbah yang sudah ada. Terutama penanganan limbah dari hasil industri, bisnis, limbah domestik yang diproduksi. Kondisi penanganan limbah harus diperhatikan, karena menyangkut kesehatan khalayak ramai tidak hanya masyarakat Indonesia namun juga masyarakat internasional yang berafiliasi di Jakarta.

Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, tidak hanya akan berdampak kepada masyarakat domestik tetapi juga akan berpengaruh terhadap wisatawan mancanegara (WISMAN) dan juga warga negara asing yang menetap di Jakarta. Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan layanan sanitasi di Jakarta dapat dilihat dari inisiatif Pemerintah untuk bekerja sama dengan negara pendonor yaitu Jepang. Salah satu organisasi bantuan luar negeri Jepang yang dikenal dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sub dari *Official Development Assistance* (ODA) yang membantu negara-negara berkembang. Jepang berdiri sebagai peminjam dana lunak untuk membantu Indonesia dalam pembangunan sistem pengolahan air limbah (*Sewerage system*) di Jakarta.

Skema bantuan Jepang terhadap Indonesia adalah suatu tanggung jawab bersama berkenaan dengan sanitasi adalah permasalahan global dan selalu menjadi isu di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga bantuan dari JICA tersebut menjadi fokus dari penulisan ini yang akan membahas latarbelakang mengapa Jepang membantu Indonesia dalam penanggulangan air limbah di Jakarta.

2. LITERATURE REVIEW

Terdapat kajian tentang *Kepentingan Jepang Melalui JICA Terhadap Pemberian Bantuan Proyek DSDP di Indoensia*, kajian instalasi pengolahan air limbah ini sudah dilakukan oleh Tular, Priadarsini dan Widyanugraha (2016) dalam proyek *Denpasar Sewerage Development Project (DSDP)* di Bali. Dalam kajian ini, ketiganya menganalisa kepentingan kerja sama bantuan luar negeri Jepang melalui JICA dalam bentuk bantuan pinjaman dana ke Indonesia. Diketahui bahwa DSDP dalam studi ini adalah proyek yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Pemerintahan Jepang- Indonesia. Didalam studi ini mengatakan bahwa bantuan Jepang tidak hanya berlandaskan untuk kesehatan lingkungan saja, namun juga untuk memastikan kesehatan warganya yang tinggal atau berlibur ke Bali. Namun ketiga peneliti ini menemukan hasil yang menunjukkan bahwa bantuan Jepang dilatarbelakangi kepentingan nasionalnya yaitu keuntungan ekonomi, pelatihan tenaga ahli dan tercapainya tujuan bantuan ODA. Studi ini lebih memaparkan kepentingan nasional Jepang dalam memberikan bantuan ke Indonesia

Studi selanjutnya yang meneliti alternatif penanggulangan air limbah di Jakarta menemukan bahwa Jakarta sedang mengalami masalah yang serius tentang pencemaran air. Kedua peneliti ini membagi jenis pencemaran berdasarkan BOD, yaitu pencemaran sungai, pencemaran air tanah dan pencemaran Teluk Jakarta. Dalam studi ini, kajian yang dilakukan tim JICA menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Jakarta merupakan faktor dominan yang melakukan pencemaran air. Oleh karena itu, solusi yang ditemukan adalah memberikan *treatment* atau perawatan terhadap air limbah berdasarkan kepadatan suatu wilayah.

Perawatan tersebut adalah perawatan ditempat (*On Site Treatment*) berupa limbah dari toilet dan air limbah rumah tangga dan sistem riolisasi (*Sewerage system*). Studi ini lebih mengangkat solusi alternatif tentang penanganan air limbah di Jakarta.

Sebagaimana tujuan dari kajian pustaka adalah untuk mencari penelitian yang sudah ada ataupun relevan. Sehingga membantu peneliti untuk mencari pembaharuan dari studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan mengkaji hasil dari penelitian terhadap kepentingan Jepang di Indonesia dalam bentuk bantuan DSDP di Bali. Begitu juga kajian yang sudah dilakukan oleh Yudo dan Said yang lebih mengarah kepada kerjasama JICA untuk mencari alternatif penanganan air limbah di Jakarta. Namun dalam penelitian ini, fokus yang dibahas adalah IPAL yang dibangun di Jakarta. Penulis meyakini bahwa belum ada studi yang meneliti bantuan latarbelakang bantuan Jepang di Jakarta melalui analisis bantuan luar negeri dan teori kontruksi sosial.

Selanjutnya, Untuk mengetahui latar belakang keterlibatan subjek dalam penelitian (Jepang) untuk membantu negara penerima donor (Indonesia) dalam penanggulangan air limbah di Jakarta, maka digunakanlah konsep yaitu *foreign aid agency* dan teori konstruksi sosial untuk mendukung konsep bantuan tersebut

2.1 Foreign Aid Agency

Dalam penelitian ini konsep *foreign aid agency* dan kepentingan negara pendonor merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan bantuan luar negeri Jepang dalam pembangunan pengelolaan air limbah di Jakarta. Bantuan luar negeri adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh negara untuk mencapai sebuah kepentingan dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut. Oleh karena itu, dalam bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara pendonor terdapat kepentingan nasional yang berupa motif-motif seperti ekonomi, politik dan kemanusiaan (Palendra, 2018)

Dalam hubungan internasional keterlibatan negara-negara maju yang memiliki *foreign aid agency* merupakan hal yang lumrah seperti Australia dengan *Australian Aid* (AUSAID) dan Amerika Serikat dengan *United State Aid*

(USAID), yang mengelontorkan dana untuk bantuan luar negeri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing negara pendonor. Rutsch (dalam Tular, dkk, 2016) menjelaskan bahwa untuk dana bantuan tersebut negara pendonor menyumbangkan dana yang terbilang sangat besar, walaupun dana tersebut kurang dari 5% dan ada juga yang kurang dari 1% dari APBN negara pendonor.

JICA berdiri sebagai agensi resmi dari Pemerintah Jepang yang bertujuan untuk mendorong pembangunan negara-negara berkembang. Jepang bermitra tidak hanya mencakup negara namun juga memiliki mitra pada tingkat lembaga swadaya, Pemerintah daerah dan juga perguruan tinggi (JICA, 2012). Sebagaimana JICA ini adalah *International Governmental Organization* (IGO) yang merupakan sub dari ODA yang memberikan bantuan berupa dana yang didukung oleh Pemerintah Jepang. Jepang sendiri memiliki teknologi dan pembangunan sebagai modal yang fundamental untuk berkontribusi dan memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Sebagai bentuk kongkrit bantuan yang bisa dilihat adalah keterlibatan JICA dalam penanganan air limbah di Jakarta. Sehingga dapat dilihat dari kesepakatan yang menghasilkan bantuan berupa dana lunak dalam pembangunan mega proyek yang diagendakan oleh Indonesia untuk membangun sistem air bersih di beberapa zona di Jakarta.

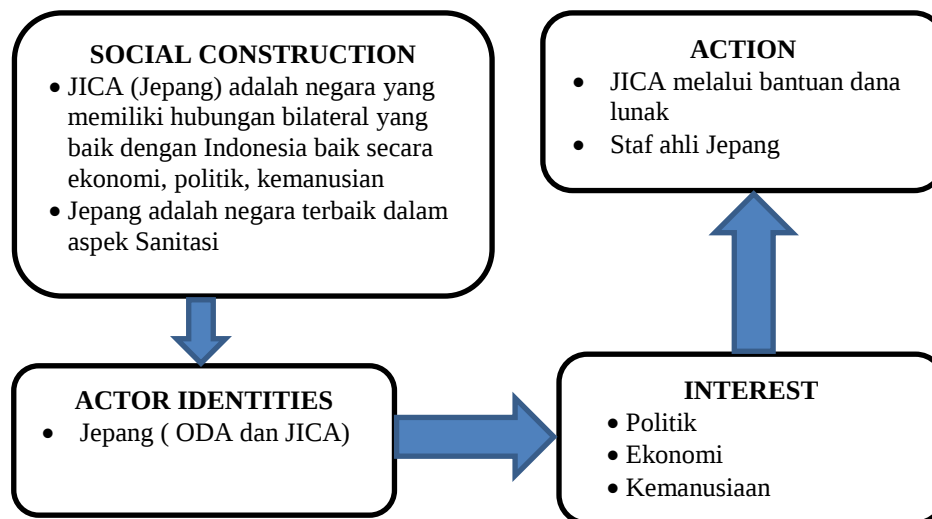
2.2 Konsep Konstruktivisme

Dalam konsep konstruktivisme yang dijelaskan oleh Alexander Wend tentang struktur internasional yang merupakan konstruksi sosial. Dari penjelasan tersebut dapat disederhanakan bahwa konstruksi sosial merupakan upaya untuk menciptakan keyakinan terhadap sesuatu kebenaran melalui proses intersubjektif dan pemahaman bersama yang pada tujuannya adalah untuk membentuk kebenaran pada tatanan internasional. Contoh dari konstruksi sosial yang ditemukan adalah Amerika yang menganggap bahwa nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara merupakan suatu ancaman, namun nuklir yang dimiliki oleh Inggris dan Israel bukan merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Interaksi dari aktor-aktor ini pada akhirnya membentuk suatu realitas pada tatanan internasional bahwa nuklir yang

dimiliki oleh Korea Utara sangat membahayakan tatanan dunia. Manifestasi lain dari konstruksi sosial ini bisa dilihat dari cara Amerika menyebarkan paham demokrasi ke negara-negara dunia. Hal tersebut sebagai upaya membangun atau mengkonstruksi kepada dunia bahwa Amerika merupakan negara yang memiliki kemampuan dan sebagai negara superior dalam menyebarkan paham demokrasi. Oleh karena itu tidak ada negara yang menyaingi Amerika Serikat sebagai pencetus negara demokrasi di dunia.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa struktur sosial merupakan interaksi bilateral ataupun multilateral antar subjek atau aktor yang bisa berupa negara, *Non Governmental Organization* (NGO) dan individu yang di mana masing-masing memiliki kemampuan dan kebutuhan dalam memenuhi persyaratan untuk berinteraksi. Sehingga dari interaksi tersebut akan menimbulkan suatu konstruksi sosial yang ingin dibangun oleh subjek atau aktor. Akan tetapi, konstruksi yang dibangun merupakan bentuk dari gagasan yang bukan dari stimulasi fakta empirik.

Pemaparan di atas merupakan landasan bagi penulis untuk mengetahui keterlibatan Jepang kepada dunia bahwa setiap bantuan yang diberikan merupakan upaya untuk membangun kebenaran terhadap identitas Jepang yang ingin diakui oleh dunia. Interaksi yang dilakukan oleh Jepang bisa dilihat dari upaya Jepang melakukan pendekatan dengan negara-negara berkembang. Pendekatan tersebut dapat dilihat dari pola bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bantuan tersebut berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh Jepang dan identitas yang ingin dibangun setelahnya. Oleh karena itu, adanya keinginan penulis untuk mengungkap kenapa Jepang terlibat dalam proyek pembangunan IPAL di Jakarta melalui konsep konstruktivisme. Hemat penulis dalam skenario bantuan Jepang bukanlah suatu unsur murni berupa bantuan. Oleh karena itu untuk memetakan konstruksi sosial oleh Jepang dapat digambarkan dengan skema dari konsep konstruktivisme yang meliputi *sosial construction, actor identity, interest, interest*. Skema tersebut digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 1 Peta Konstruksi Sosial Jepang

3. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pola eksplanatif. Penulis dengan menggunakan data sekunder seperti buku hubungan internasional, jurnal, artikel dan laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian dalam upaya untuk menjawab rumusan masalah. Data yang didapat diolah dengan menggunakan pendekatan teori bantuan luar negeri yang berkaitan dengan bantuan Jepang terhadap Indonesia dalam menanggulangi air limbah di Jakarta. Untuk menjaga kredibilitas data, maka data-data yang dikumpulkan dipilih secara selektif supaya data tersebut dapat dipercaya

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kerjasama JICA dan Indonesia dalam Menanggulangi Air Limbah di Jakarta

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu air limbah di Jakarta yaitu dengan cara memasukan program air limbah ini kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun anggaran untuk pembangunan IPAL terbilang sangat besar. Sehingga Pemerintah Indonesia menggandeng Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) untuk menandatangani perjanjian berupa

pinjaman dana lunak ODA Jepang yang berjumlah 30,98 Miliar Yen. Dana lunak yang dimaksud dalam kerjasama tersebut merupakan dana pinjaman dengan suku bunga kecil. Menurut dari pemberitaan resmi JICA, mengatakan bahwa dana yang dipinjamkan oleh Jepang selanjutnya akan digunakan untuk memulai pembangunan IPAL yang mencakup skala besar dan didukung dengan teknologi tinggi.

Dalam revisi *master plan* bulan Maret 2012 dimasukan dalam proyek peningkatan pembangunan pada sektor pembuangan limbah yang ditinjau kembali oleh manajemen pengelolaan air limbah di Jakarta. Dalam tinjauan tersebut bahwa populasi air limbah meningkat pada tahun 2020 sebanyak 20% dan diperkirakan akan mencapai 80% pada tahun 2050 (PUPR, 2018). Isu dari sektor pembuangan air limbah merupakan hasil dari percepatan urbanisasi, pertumbuhan populasi yang mencapai jumlah lebih dari 10 juta jiwa. Akan tetapi perkembangan dari pembangunan infrastruktur seperti suplai air dan pengelolaan limbah bisa dikatakan lambat.

Tabel 1. Syarat dan Ketentuan Pinjaman Lunak (Laporan JICA)

Proyek	Nilai (Milyar Yen)	Rasio Bunga Tahunan (%)		Jangka Waktu Peminjaman (Tahun)	Masa Tenggang (Tahun)	Pengadaan Barang Jasa
		Proyek	Jasa Konsultasi			
<i>Jakarta Sewerage Development Project (Zone 6) (Phase 1)</i>	30,98	1,3	0,01	25	7	Umum Tidak Terikat

DKI Jakarta dalam mengatasi air limbah dibantu oleh Kementerian Pembangunan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui pinjaman dana lunak JICA. Bantuan dana tersebut digunakan untuk pembangunan proyek pengolahan air limbah yang terletak

pada zona 6. Berdasarkan pada *master plan*, evaluasi zona pengolahan air limbah didasarkan pada zona -1 dan zona-6 yang dipilih sebagai zona prioritas. Pembangunan zona IPAL dibagi sebagai berikut:

Tabel 2. Development Master Plan and Sewerage Zones for Each Target Development Year (PUPR, 2018)

Term	Development Year	Zone No.	Remarks
Short-term	2012-2020	1, 6	Priority projects. Facility coverage 20%
Mid-term	2021-2030	4, 5, 8, 10	Facility coverage 40%
Long-term	2031-2050	2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14	Facility coverage 80%

Kerja sama Jepang dan Indonesia dapat diproyeksikan sebagai kerjasama yang fokus dalam pembangunan berkelanjutan. Namun dalam pembangunan IPAL selanjutnya, akan dilakukan pelelangan yang dilakukan oleh kementerian pelaksana pembangunan. Sehingga akan menimbulkan persaingan bantuan luar negeri baik dari modal dan teknologi. Australia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam bantuan penanganan air bersih. Daerah yang dibantu Australia adalah Serang, Banten melalui bantuan hibah air bersih (dfat.gov.au, 2017). Akan tetapi, Jepang dalam lobi bantuan berupa dana lunak yang memberikan suku bunga kecil. Tidak hanya itu, Jepang dalam pengolahan limbah domestiknya sudah menggunakan teknologi canggih dan juga sudah diakui sebagai negara yang sering membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan sanitas. Oleh karena itu, hubungan kerja sama JICA dan Indonesia akan berlangsung dalam jangka panjang berkaitan dengan pembangunan beberapa zona IPAL di Jakarta.

4.2 Kontruksi Bantuan Jepang dalam Proyek IPAL

Hubungan kerjasama dalam bentuk bantuan luar negeri terdiri dari pendonor dan *recipient*. Sebagaimana yang diketahui pendonor adalah negara atau organisasi yang memiliki kelebihan dalam memberikan bantuan, sedang *recipient* ini adalah sebuah negara atau suatu organisasi yang membutuhkan bantuan atau menerima bantuan. Oleh karena itu, dengan hubungan kesadaran bahwa adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan selalu akan didasari pada motif tertentu dibalik bantuan tersebut. Motif yang dimiliki oleh pendonor dalam bantuannya agak sulit diprediksi karena bisa berubah kapan saja dan dalam bentuk yang bervariasi. Namun beberapa peneliti mengemukakan bahwa motif pendonor dalam bantuannya terdiri dari tiga hal yaitu, motif politik yang digunakan untuk mendapatkan pengaruh secara politik, motif kemanusiaan yaitu berupa kepedulian terhadap rasa kemanusiaan, dan yang terakhir adalah motif ekonomi yaitu untuk mendapatkan

keuntungan ekonomi secara berkelanjutan atau pada waktu tertentu saja.

4.3 Motif Politik dan Kemanusiaan

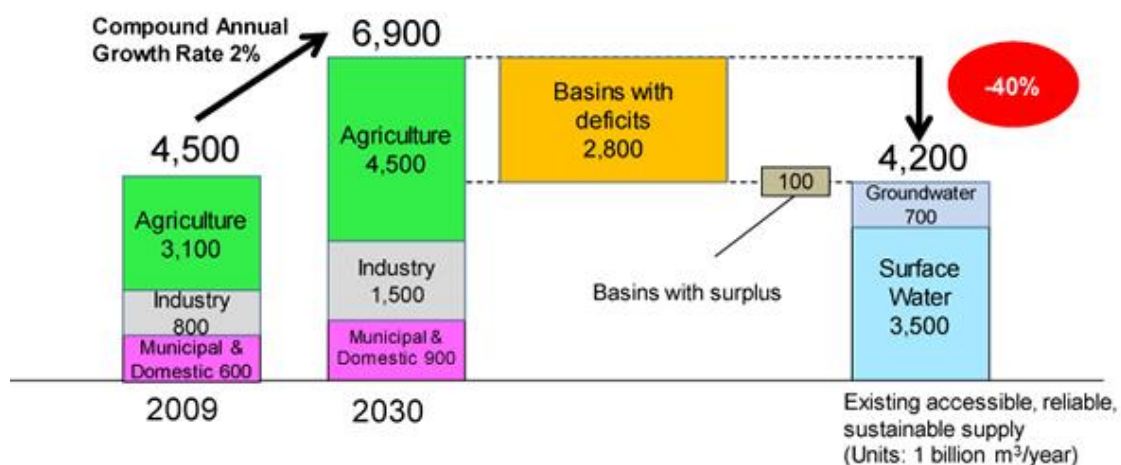
Jepang dalam bantuan donor *Development aid* di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Peranan Jepang dalam memberikan bantuan baik berupa dana dan bantuan kemanusiaan menandai perananan Jepang sangat signifikan. Bantuan Jepang dapat dilihat sebagai upaya untuk mengokohkan posisi politik Jepang di Asia dan dunia. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan Jepang tersebut ditunjukkan dengan keterlibatan aktif Jepang dalam agenda global seperti *Sustain Development Goals* (SDGs). Upaya Jepang dalam membangun identitasnya adalah dengan mengikuti agenda SDGs tersebut. Salah satu upaya kontruksi sosial yang dibangun Jepang yaitu melalui Agenda SDGs yang ke enam berkaitan dengan air bersih *clean water and sanitation*.

Keterlibatan Jepang dalam mengaktualisasikan tujuannya dengan cara memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang seperti bantuan pembangunan dan dana. Salah satu bantuannya adalah pembangunan IPAL di Jakarta. Bantuan Jepang ini merupakan momen yang tepat untuk membangun dan memperkuat pengaruh politik Jepang dalam agenda global. Motif bantuan Jepang dalam agenda SDGs tidak hanya dilihat sebagai motif politik, namun bisa dikatakan sebagai bantuan kemanusiaan karena air bersih menyangkut keberlangsungan hidup khalayak ramai. Berdirinya SDGs merupakan ajang pembuktian negara-negara internasional baik

negara maju maupun negara berkembang untuk unjuk diri.

Berawal dari *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan agenda global yang digagas pada tahun 2002-2015. Salah satu dari agenda Agenda tersebut berupa program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan yang ekstrim sebagai salah satu awal dan dimulainya pertama kali strategi global yang disepakati oleh negara-negara anggota *United-Nation* (UN). Namun dalam pelaksanaannya MDGs mendapatkan kritikan bahwa kemajuan dari target yang sudah ditentukan tidak seimbang secara regional dan tematis karena MDGs lebih diterapkan pada negara global bagian selatan (Woodbridge, 2015).

Salah satu dari upaya agenda MDGs adalah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang kekurangan akses air bersih yang tercapai pada tahun 2010, namun pada tahun 2015 masih diperkirakan 660 juta jiwa di dunia (Unicef.org, 2015). Oleh karena itu, MDGs berkenaan dengan akses air bersih masih belum tercapai dan permasalahan air bersih ini masih sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Lantas timbul pertanyaan apa yang membuat SDG's ini berbeda dengan MDG's pada aspek sanitasi. Hal tersebut terlihat dari advokasi *World Healt Organization* (WHO) dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) yang mendefinisikan sanitasi sebagai air minum yang berasal dari sumber air yang lebih baik (air leding, lubang bor atau tabung, air sumur, mata air dan air hujan yang terlindungi). Oleh karena itu, program SDGs fokus pada kualitas dari sumber akses air bersih dan tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan kualitas air.



Gambar 2. Tuntutan Kebutuhan Air yang Melebihi Sumber Air pada Tahun 2030 (Jica.go.jp)

Jepang merupakan negara yang mengalami banyak tantangan berkaitan dengan penyakit menular melalui air seperti Kolera, dll. Selain mengalami penyakit yang menular Jepang juga membatasi penggunaan air karena diakibatkan kekeringan, mengalami kebocoran air yang tinggi setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 dan juga mengalami polusi limbah dari industri domestik yang mengotori aliran sungai. Namun saat ini, Jepang merupakan negara pemasok air layak minum melalui keran 24 jam sehari. Sebagai negara yang termasuk memiliki prestasi Jepang juga sebagai negara yang membantu negara-negara berkembang yang mengalami penurunan tanah dan efisiensi dalam penggunaan air yang terbilang tinggi seperti pengendalian kebocoran serta penggunaan kembali air limbah dari industri. Begitu juga bantuan Jepang yang ada di Indonesia merupakan bentuk kongkrit dari keseriusan Jepang sebagai *leading country* dalam hal sanitasi dan air bersih.

Oleh karena itu Jepang lebih mengedepankan keberlangsungan industrinya untuk meningkatkan pendapatan domestik Jepang di Indonesia. Upaya Jepang dalam keterlibatannya pada proyek IPAL menunjukkan adanya kepentingan kemanusiaan, yaitu kesehatan masyarakat untuk keberlangsungan hidup. Namun jika ditelaah lebih dalam lagi bahwa Jepang melalui Agenda global SDGs melakukan manuver yang bisa memperkuat pengaruh politiknya di kawasan yang membutuhkan bantuan sanitasi termasuk di Indonesia. Sekaligus ingin membangun identitas bahwa Jepang merupakan negara yang peduli terhadap akses air bersih di negara berkembang dengan memberikan bantuan baik dari dana dan pembangunan.

4.4 Motif Ekonomi

Bantuan luar negeri merupakan bantuan yang diberikan oleh negara pendonor kepada negara penerima donor, pemberian bantuan luar negeri kepada suatu negara oleh negara lain biasanya memiliki motif didalam pemberian bantuan-bantuan tersebut. Salah satu motifnya adalah mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi oleh negara pendonor. Hal ini tidak berbeda dari negara Jepang yang juga memiliki motif tertentu didalam setiap pemberian bantuan luar negerinya. Dalam

proyek IPAL Jakarta Jepang memberikan bantuan dana lebih dari 30 miliar Yen atau lebih dari 4 triliun rupiah kepada Indonesia, dengan Jepang memberikan bantuan melalui JICA Jepang telah mendapatkan keuntungan secara Ekonomi. Hal ini didapatkan dari Bunga tahunan pinjaman sebesar 1,35% yang harus dibayarkan oleh Indonesia kepada Jepang selama 25 tahun dengan jumlah total pembayaran sekitar lebih dari 40 miliar rupiah disini saja kita telah dapat melihat keuntungan yang diterima Jepang dibidang ekonomi.

Berdasarkan pengalaman proyek sanitasi yang dilakukan oleh Jepang di Bali yang bernilai 1 triliun Rupiah, dengan proyek yang hampir sama dengan proyek sanitasi di Jakarta, pada proyek DSDP di Bali Jepang menetapkan bahwa konsultan yang dipakai untuk menangani proyek di Bali harus menggunakan konsultan Jepang dan selanjutnya Jepang meminta kepada Indonesia saat itu untuk memperbolehkan perusahaan-perusahaan Jepang dapat turut andil dalam tender yang akan dilakukan, menurut hukum di Indonesia apa yang dilakukan oleh Jepang dengan meminta keterlibatan pihak Jepang dalam proyek tidak lah melanggar hukum, hal ini berdasarkan Perpres 54 Th. 2010, Proyek yang bernilai lebih dari Rp 10.000.000.000 konsultannya boleh berasal dari konsultan asing dan proyek bernilai lebih dari Rp 100,000,000,000, kontraktornya boleh berasal dari kontraktor asing, tidak menutup kemungkinan kedepanya dalam proyek di Jakarta, Jepang juga akan meminta hal yang sama dengan proyek di Bali, karena Notabene Jumlah bantuan Jepang dalam proyek IPAL Jakarta lebih besar dari DSDP Bali.

Secara umum Indonesia merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar Jepang. Hubungan Indonesia dan Jepang telah terjalin cukup lama, dimulai tahun 1958 hingga sekarang yang menunjukkan kedua negara memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Pada data tahun 2018 total investasi Jepang di Indonesia senilai 4,9 milyar Dollar Amerika atau sekitar 16 persen dari total PMA Indonesia. Jepang duduk di posisi kedua terbanyak dalam jumlah investasi luar negeri di Indonesia hanya dibawah Singapura dan diatas China (Sukmana, 2019). Jepang juga memiliki

jumlah perusahaan yang cukup banyak berlokasi di daerah Jakarta, tercatat ada sekitar lebih dari 550 perusahaan Jepang yang berlokasi di Jakarta atau kisaran 50% perusahaan Jepang di Indonesia (Perusahaanjepang.com, 2016)

Data investasi Jepang di Indonesia dan di Jakarta diatas menunjukkan bahwa hubungan ekonomi yang terjalin di Indonesia secara umum dan terkhusus di Jakarta tergolong cukup penting, oleh karenanya dengan tindakan Jepang membantu proyek sanitasi di Indonesia (Jakarta) merupakan salah satu strategi bagi Jepang untuk tetap mempertahankan Indonesia sebagai mitra dalam bidang ekonomi Jepang, karena berdasarkan sejarah Strategi bantuan Jepang di Indonesia merupakan salah satu cara Jepang untuk meningkatkan hubungan baik dengan Indonesia termasuk ekonominya. Namun implemementasi bantuan Jepang melalui JICA pada proyek pembangunan IPAL di Jakarta tidak bisa dilihat hanya sebatas bantuan yang bersifat altruisme Jepang, melainkan suatu perwakilan dari kepentingan Jepang dalam menjaga industri-industri Jepang yang beroperasi di Jakarta.

5. PENUTUP

Dalam pembahasan bahwa motif dari bantuan luar negeri terdiri dari politik, kemanusiaan dan ekonomi. Motif-motif tersebut merupakan bagian dari upaya Jepang untuk membangun suatu kebenaran dan identitas bahwa Jepang merupakan negara yang mampu serta serius dalam masalah air bersih yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Untuk menjawab keterlibatan Jepang dalam penanggulangan air limbah di Jakarta yaitu sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, Jepang mendapatkan bunga dari pinjaman dana lunak serta membuka peluang untuk perusahaan jepang berinvestasi air bersih di Jakarta. Keuntungan lainnya seperti memperlancar hubungan bilateral dengan Indonesia. Dengan motif tersebut Jepang sekaligus berusaha untuk mengkonstruksi pandangan dunia internasional bahwa Jepang merupakan negara yang sangat *concern* dan sebagai negara pendonor air bersih terbesar di dunia sehingga membangun suatu konstruksi

bahwa Jepang dalam kontestasi bantuan air bersih mejadi negara top global dalam membantu memproduksi air bersih diantaranya pengelolaan air limbah di Jakarta.

6. DAFTAR PUSTAKA

- dfat.gov.au. (2017). Australia meningkatkan akses air bersih di Indonesia.
- Jayani, D. H. (2019). Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2019 Mencapai 10,5 Juta Jiwa | Databoks.
- Jica.go.jp. (n.d.). Overview | Our Work | JICA.
- JICA. (2012). Program Kemitraan JICA.
- Manullang, Z. D. (2014). Evaluasi Dampak Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Dalam Pemberdayaan Masyarakat.
- Palendra, A. R. (2018). *Motif Pemberian Bantuan Luar Negeri Oda (Official Development Assistance) Jepang Ke Indonesia Tahun 2011-2015*.
- Perusahaanjepang.com. (2016). Japanese Company List in Indonesia - Japanese Company Directory in Indonesia | Perusahaanjepang.com.
- PUPR. (2018). Project Completion Report On The Project For Improving Planning Capacity For The Sewerage System In Dki Jakarta.
- Rutsch, P. (2015). Guess How Much Of Uncle Sam's Money Goes To Foreign Aid. Guess Again! *National Public Radio*.
- Sukmana, Y. (2019). Ini 5 Negara dengan Investasi Terbesar di Indonesia Tahun 2018.
- Unicef.org. (2015). Progress on Sanitation and Drinking Water: 2015 Update and MDG Assessment | UNICEF Publications | UNICEF.
- Wibowo, L. R., & Widjonarko, D. (2014). *Efektivitas Program Sanimas di Kabupaten Banyumas* (Vol. 3).
- Woodbridge, M. (2015). The Sustainable Development Goals (SDGs), the centerpiece of the 2030 Agenda for Sustainable Development, were adopted by the United Nations Sustainable Development Summit in September 2015. *Urban Issues*, 01, 04.
- Yudo, S., & Said, N. I. (2001). Masalah Pencemaran Air Di Jakarta, Sumber Dan

Alternatif Penanggulangannya. *Jurnal
Teknologi Lingkungan*, 2, 199–206.